



PDIP Sumut Sodorkan Figur Lawan Bobby di Pilgubsu

Galang Koalisi Semut

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) PDIP akan menyiapkan koalisi semut untuk melawan koalisi gemuk yang akan mengusung Bobby Nasution di Pilgub Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Bobby saat ini didukung oleh Gerindra, Golkar, PAN, PKB, NasDem dan Partai Demokrat. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menjelaskan mengapa partai mengibaratkan kerja sama koalisi nanti dengan semut. Sebab, menurut



Bersambung ke Hal 11



Medan, MIMBAR - DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) telah menyodorkan dua nama untuk melawan Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, dalam Pilgub Sumut 2024.

Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon mengatakan kedua nama itu sudah diserahkan kepada DPP PDIP. Mereka yaitu Nikson Nababan dan Edy Rahmayadi.

"PDIP melalui penjangkaran dan diusulkan ke DPP. Soal nama ada juga kader kita Nikson Nababan, non kader ada Edy Rahmayadi. Dan itu semua sudah

Bersambung ke Hal 11

Jaga Marwah dan FMPB Demo KPK

Minta Bupati Simalungun Ditangkap



Jakarta, MIMBAR - Seratusan massa Jaringan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) dan Forum Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumatera Utara berunjuk rasa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (11/07/2024).

Massa aksi yang dipimpin Ketua Umum Jaga Marwah Edison Tamba, mendesak KPK menangkap Bupati Simalungun Radiapoh Hasilolan Sinaga terkait dugaan korupsi sejumlah proyek di Pemkab Simalungun dan harta tak wajar milik bupati yang tidak

Bersambung ke Hal 11



Eksekusi lahan di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang ricuh, satu unit mobil pemadam kebakaran terbakar akibat bentrok warga dengan Satpol PP Deli Serdang, Kamis (11/7/2024). (Foto Kitakini. news)

Eksekusi 25 Bangunan Ilegal di Sampali Berakhir Chaos

Medan, MIMBAR - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang merubuhkan 25 unit bangunan tak berizin (ilegal) yang berdiri di atas lahan 65 Dusun 24 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (11/7).

Namun, perubahan bangunan gudang, ruko dan tembok pagar itu mendapat perlawanan dari masyarakat diduga penggarap.

Massa memblokir jalan dengan cara mem-

bakar ban bekas hingga menimbulkan kepulan asap tebal hitam.

Selain itu, massa yang telah terprovokasi melempari petugas Satpol PP dan personel kepolisian serta TNI yang melakukan pengamanan menggunakan batu dan botol.

Akibatnya, sejumlah personel Satpol PP dan kepolisian terluka kena lemparan hingga harus mendapatkan perawatan medis.

Bahkan, satu unit mobil pemadam kebakaran

Pemkab Deli Serdang terbakar setelah dilempar massa dengan molotov. Bagian kabin ludes terbakar, sementara petugas berhamburan.

Kabid Penindakan Perda dan Perkada Satpol PP Deli Serdang, Awal menuturkan, pihaknya dibantu personel pengamanan kepolisian dan TNI melakukan perubahan karena 25 bangunan tersebut berdiri tanpa izin.

Bersambung ke Hal 11

SYL Divonis 10 Tahun

Jakarta, MIMBAR - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) divonis dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsidier empat bulan kurungan.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menilai SYL telah terbukti melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

5 MUHARRAM 1446 H

Subuh : 05:00 WIB	Maghrib : 18:43 WIB
Zuhur : 12:34 WIB	Isya : 19:57 WIB
Ashar : 15:59 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Survei Pesanan di Pilgubsu

Oleh Dr A Rasyid, MA



LEMBAGA survei sudah mulai bermain di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Survei coba menggiring opini publik ke satu tujuan yang diinginkan. Kasarnya, yang pesan dan bayar. Seharusnya masyarakat tidak tergoda dengan survei-survei yang bermunculan.

Siapa bilang survei tidak bisa dibayar, siapa bilang survei senantiasa objektif dan tidak memihak dalam mengeluarkan data hasil surveinya?

Bersambung ke Hal 11

ALIANSI JURNALIS KARO GELAR AKSI DAMAI TERKAIT PEMBAKARAN RUMAH WARTAWAN

Kapolres Didesak Tangkap Aktor Intelektualnya

ALIANSI Jurnalis Kabupaten Karo yang terdiri dari Persadaan Jurnalis Tanah Karo (PJTK), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), IMO, SMSI, Koswari dan LSM BAIN HAM, KCBI dan Laskar Merah Putih melaksanakan aksi damai di Mapolres Karo, Kamis (11/7). Mereka meminta Kapolres Karo untuk mengusut tuntas dalang intelektual pembakaran rumah wartawan yang menewaskan 4 orang penghuni rumah, termasuk wartawan Rico Pasaribu.

Sebelum ke Mapolres Karo, massa melakukan orasi di depan gedung DPRD Kabupaten Karo.



Aliansi Jurnalis Kabupaten Karo yang terdiri dari Persadaan Jurnalis Tanah Karo (PJTK), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), IMO, SMSI, Koswari dan LSM BAIN HAM, KCBI dan Laskar Merah Putih melaksanakan aksi damai menyampaikan pendapat, Kamis (11/7) di Kantor DPRD dan Mapolres Tanah Karo. (Foto Mimbar/ Jusranta Surbakti)

Sayang, tak seorang wakil rakyat yang menyambut kehadiran mereka. Alasannya, surat pemberitahuannya terlambat masuk. Seperti diketahui, sejak

peristiwa pembakaran rumah wartawan Rico Pasaribu pada 27 Juli 2024 lalu,

Bersambung ke Hal 11

LUAR NEGERI

Jelang Serangan Besar-besaran

Israel Usir Warga Palestina di Gaza City

Gaza, MIMBAR - Tentara Israel menjatuhkan selebaran di atas wilayah Gaza City pada Rabu (10/7), berisi pesan mendesak semua warga Palestina untuk mengungsi jelang serangan besar-besaran di wilayah tersebut.

Selebaran yang ditujukan kepada "semua orang di Gaza City" itu turut mencantumkan rute pelarian yang sudah ditentukan, dan memperingatkan bahwa

Bersambung ke Hal 11

long Dede

- Masih ada yang berani...?
- Hehehe ...

TERKAIT PENARIKAN DANA DARI BSI

Muhammadiyah Bantah Soal Jatah Kursi Komisaris

Jakarta, MIMBAR - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti membantah pengalihan dana organisasinya dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara mendadak berkaitan dengan alasan pribadi.

Mu'ti menegaskan pengalihan dana itu bukan karena dirinya tidak mendapat kursi komisaris di BSI.

"Saya kira bukan karena Abdul Mu'ti tidak jadi komisaris ya," kata Mu'ti di kantor PP Muhammadiyah,

Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

"Orang [ditawari] jadi wakil menteri juga ditolak. Jadi bagi saya pribadi tidak ada persoalan dengan itu," tambahnya.

Mu'ti menjelaskan Muhammadiyah menarik dana dari BSI setelah melakukan berbagai macam pengkajian terhadap dana-dana yang ada di bank. Berdasarkan kajian tersebut, penyimpanan dana Muhammadiyah terkonsentrasi di BSI.

Muhammadiyah merasa hal tersebut sangat berisiko, baik untuk Muhammadiyah maupun untuk BSI.

"Setelah kita evaluasi ini bisa berisiko. Bisa berisiko. Bagi bank sendiri menurut saya juga bisa berisiko. Karena di antara risiko bank itu kan risiko konsentrasi. Ketika 1 nasabah terlalu besar, yang lain nggak ada," jelasnya.

"Itu kan begitu nasabah ini bermasalah, maka bank itu mesti akan bermasalah. Itu kan dalam risiko bank

itu kan," imbuhnya.

Selain itu, Muhammadiyah juga mengklaim menarik dana dari BSI agar bisa menjalin kemitraan dengan bank syariah lain.

"Muhammadiyah ingin lebih terkonsolidasi di berbagai lembaga-lembaga mitra. Karena itu juga lebih memudahkan dalam kita ini membangun komunikasi dengan institusi-institusi perbankan syariah di tingkat daerah," ucapnya.

Muhammadiyah mendadak menarik dananya dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan memindahkannya ke bank syariah lain.

Penarikan ini terungkap usai sebuah memo yang ditekankan Ketua Muhammadiyah Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah Muhammad Sayuti beredar. Memo bernomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana itu terbit pada 30 Mei 2024 lalu. Isinya, arahan untuk rasionalisasi

dana simpanan dan pembiayaan Muhammadiyah yang selama ini ada di BSI. Uang tersebut diperintahkan untuk segera dialihkan ke sejumlah bank syariah lain.

Keputusan itu disebut sebagai tindak lanjut pertemuan bersama pimpinan PP Muhammadiyah dan Ansal Usaha Muhammadiyah (AUM) mengenai konsolidasi keuangan AUM. Pertemuan itu terjadi di Yogyakarta pada 26 Mei 2024 lalu. (cnni/js)

Minta Bupati...

Dari Halaman 1

masuk dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Kami meminta KPK menangkap Bupati Simalungun terkait kasus dugaan korupsi di Pemkab Simalungun. Kami juga meminta KPK menelusuri harta tak wajar milik bupati yang tidak masuk LHKPN berupa rumah mewah di Kecamatan Tiga Runggu Kabupaten Simalungun dan sejumlah aset miliknya dan peternakan ayam di kawasan Bosar Maligas, Simalungun," kata Edoy, panggilan akrab Edison Tamba, dalam orasinya.

Edoy juga membeberkan soal kemungkinan terjadinya dugaan gratifikasi soal adanya permohonan peternakan babi milik PT Allegrindo Nusantara di Desa Urung Pane, Kecamatan Purba, Simalungun. Apalagi saat ini pihak PT Allegrindo tengah bermohon kepada Pemkab Simalungun untuk mengoreksi revisi Perda No 10 tahun 2012 Pemkab Simalungun terkait rencana tata ruang wilayah Simalungun tahun 2011-2031.

Point penting dalam perda itu bahwa lahan peternakan babi milik PT Allegrindo Nusantara berada di kawasan permukiman bukan peternakan. "Kami mencium adanya upaya lobi-lobi yang dilakukan pihak perusahaan ke bupati. Dan kita tahu saat ini bupati Simalungun kembali mencalonkan diri di Pilbup Simalungun 2024," kata Edoy.

Keberadaan ternak babi yang kabarnya terbesar kedua di Asia itu sempat mendapat penolakan dari masyarakat dan sejumlah elemen pegiat lingkungan. Sebab keberadaannya bisa berdampak terjadinya pencemaran lingkungan dampak limbah peternakan karena letaknya berdekatan dengan Danau Toba yang menjadi wisata prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Eksekusi 25...

Dari Halaman 1

"Kita sedang melakukan pembongkaran terhadap 25 bangunan tidak memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)," terang Awal kepada wartawan di lokasi perubuhan.

Kata dia, perubahan bangunan itu merupakan kegiatan lanjutan. Dia mengakui adanya perlawanan warga karena miskomunikasi.

"Iya tadi ada chaos dengan warga karena membakar ban. Pihak damkar ingin memadamkan, tapi warga tidak terima," sebutnya.

Sementara, Kabag Ops

Sebelumnya, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiolan Sinaga dilaporkan ke KPK, Kamis (4/7).

Radiapoh dilaporkan FMPB Sumatera Utara yang diketuai M Ritonga berkaitan rumah mewah di Tiga Runggu, Kabupaten Simalungun, diduga milik Bupati Simalungun, itu tidak tertera dalam daftar LHPK). Termasuk juga lahan peternakan ayam di kawasan Bosar Maligas, Simalungun.

Dalam laporannya, FMPB Sumut, kata M Ritonga, juga melaporkan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Pemkab Simalungun. Seperti Program Hibah Jalan Daerah KSPN Danau Toba Kabupaten Simalungun dengan nilai kontrak Rp12.092.895.000 bersumber dari APBD TA. 2022, peningkatan Jalan Jurusan Tambun Rea Huta II Sipolha Kecamatan Pematang Sidamanik Bersumber dari DAK TA 2022 Rp16.730212.000.000, Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kampung Melayu/Hubuan (130 Ha) Kec Tanah Jawa (DAK) di Dinas PUTR Simalungun Rp1.524.291.840 TA 2023.

Kemudian dugaan korupsi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun TA 2022 sebesar Rp2,8 miliar.

Pembangunan MCK Di BPBD Kabupaten Simalungun TA 2021 sebesar Rp24 miliar. Sebanyak 440 paket kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dengan pagu Anggaran Rp33,4 miliar diduga dikerjakan belum pengesahan P-APBD, proyek Pengerjaan Bangunan TIC dan Perlengkapan Lokasi Wisata Ikan Mas di Kelurahan Sipolha Kec Pematang Sidamanik senilai Rp 1.180.829.465, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2023 di Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (pei/js)

Polrestabes Medan, Kompol Pardamean Hutahaean mengatakan, sebanyak 500 lebih personel kepolisian dan TNI dikerahkan untuk pengamanan perubahan 25 bangunan tak berizin tersebut.

"Ada 500 orang kita bersama TNI. Ditambah Satpol PP jadi 600 lebih," sebut Pardamean.

Ditanya soal jumlah personel yang terluka, Pardamean mengaku belum tahu. Dia juga tidak bisa menjelaskan warga yang diamankan.

"Belum tahu kita karena kita masih di lapangan, belum konsolidasi," tandasnya. (mc/js)



Hidayah

Survei Pesanan..

Dari Halaman 1

Semua itu tidak jaminan bahwa lembaga survei berjalan independen. Karena tanpa biaya survei tidak bisa dilakukan. Lalu apa alasan kita mengatakan bahwa Ketua-Ketua Partai sangat cerdas dalam menentukan siapa calon Kepala Daerah yang diusungnya? Masyarakat juga hari ini sudah tidak percaya lagi dengan Partai-Partai Politik yang ada di tanah air.

Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap Partai Politik saat ini, karena Parpol tidak membuktikan dirinya bekerja dengan baik untuk membawa aspirasi ketika orang-orang Partai Politik itu duduk di kursi empuk legislatif. Konspirasi politik sangat kental terjadi antara Partai Politik dengan Peminpin pejabat.

Kesejahteraan rakyat kecil hari ini benar-benar terpuruk, sementara para dewan duduk nyantai

menikmati perolehan gaji, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kehormatan, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, unjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran dan uang lainnya yang begitu cukup besar, termasuk juga perolehan uang pensiun.

Apa yang bisa berbuat anggota legislatif untuk kepentingan rakyat selama mereka di gedung dewan itu. Bahkan banyak diantara mereka yang asyik dengan judi onlinenya. Ini benar-benar moral anggta dewan kita sudah rusak parah.

Tentu saja kita tidak punya argumen yang kuat menyatakan bahwa Partai Politik memiliki kecerdasan dalam menentukan sosok Kepala Daerah yang layak dipimin. Semua itu adalah permainan kata-kata sebagai pembelaan. Tetapi siapa saja punya hak untuk membela diri. Tetapi tidak boleh membohongi. (*)

Dari Halaman 1

Djarot, pihak yang akan dihadapi ibarat seekor gajah. "Kita akan berusaha untuk tetap membangun koalisi, membangun kerja sama dengan rakyat di bawah. Kita akan bentuk koalisi sendiri. Biar kan semut melawan gajah," kata Djarot di kompleks parlemen, Kamis (11/7).

Dia menyadari saat ini PDIP menjadi kunci untuk melawan dominasi Bobby di Sumut. Oleh karena itu, Djarot memastikan menantu Presiden Joko Widodo itu

Dari Halaman 1

dikirim ke DPP," kata Rappidin usai berkunjung di Kantor DPW PKS Sumut di Medan, Rabu (10/7).

Ia berharap salah satu dari kedua nama itu bisa menjadi rival Bobby yang kini sudah mengantongi dukungan dari enam partai, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN dan PKB. Namun, DPP PDIP hingga kini belum memutuskan bakal calon kepala daerah yang bakal diusung di Pilgub Sumut 2024. Rappidin pun menyerahkan segala keputusan ke pusat.

"Soal nanti siapa yang menjadi keputusan DPP tentu kami all out, artinya tegak lurus. Kita berjuang sampai menang," ucapnya.

Rappidin menegaskan tak ingin Bobby Nasution melawan kotak kosong karena sudah mengantongi dukungan enam partai.

Rappidin menyebut jika hanya ada satu calon kepala daerah, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Ia pun mengingat pesan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang

Dari Halaman 1

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila terda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan," ujar ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh saat membacakan amar putusan, Kamis (11/7).

SYL juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp14,1 miliar dan 30.000 Dolar Amerika Serikat (AS), paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Jika tak mampu membayar uang pengganti dalam batas waktu tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa. Namun, jika harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana dua tahun penjara.

SYL dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim turut menyampaikan sejumlah hal yang memberatkan dan

Anggota DPRD Karo memilih sikap diam seribu bahasa tanpa sepeatah katapun menyampaikan rasa simpati.

Untuk DPRD Karo, mereka melayangkan sejumlah poin, yakni, sejak terjadinya peristiwa pembakaran rumah wartawan pada tanggal 27 Juni 2024 lalu, DPRD Karo selaku wakil rakyat kami, sama sekali tidak ada bersuara dan menyatakan sikap untuk mendesak pihak penegak hukum mengusut kasus ini.

"Untuk itu, kami wartawan Karo meminta agar DPRD Karo segera menyatakan sikap atas upaya pengungkapan kasus ini. Kami juga mendesak DPRD Karo segera melakukan Rapat Dengar Pendapat untuk membahas kasus ini dengan mengundang pihak-pihak terkait menangan kasus ini," pinta massa.

Selanjutnya, massa bergeser ke Mapolres Karo. Dengan membenteng spanduk yang bertuliskan "Polres Karo Baik Dalam Memberikan Pelayanan dan Perlindungan, Jangan Lindungi Aktor dan Intelektual Kasus Pembakaran

Dari Halaman 1

wilayah perkotaan akan menjadi "zona pertempuran yang berbahaya".

Seorang juru bicara pemerintah Israel mengklaim tujuan peringatan itu adalah "untuk menajuhkan warga sipil dari bahaya".

Salah satu warga yang terpaksa mengungsi sambil membawa barang-barang, Umm Nimr al-Jamal, menyebut ini adalah kali ke-12 keluarganya harus mengungsi akibat agresi rezim Zionis.

"Berapa kali kita bisa bertahan seperti ini? Seribu kali? Di mana kita akan berakhir," kata al-Jamal, dilansir AFP.

Pejabat Hamas, Hussam Badran, mengatakan peningkatan operasi militer adalah cara

Galang Koalisi...

terus memperjuangkan demokrasi.

"Kalau hanya satu calon melawan kotak kosong apa itu demokrasi? Kalau saya ditanya sebagai Ketua DPD, saya akan usulkan ke Ibu Megawati. Walaupun kita sendiri. Pasti kita bawa calon sendiri. Diloloskan atau tidak kami hanya bisa berdoa," tuturnya.

Rappidin pun mengaku tak gentar jika pada akhirnya PDIP memilih jalan berbeda dengan partai politik lainnya. Sebab, PDIP mempunyai 21 kursi di DPRD Sumut. Dengan demikian, partai berlambang banteng tersebut bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain.

PDIP Sumut...

terus memperjuangkan demokrasi.

"Kalau hanya satu calon melawan kotak kosong apa itu demokrasi? Kalau saya ditanya sebagai Ketua DPD, saya akan usulkan ke Ibu Megawati. Walaupun kita sendiri. Pasti kita bawa calon sendiri. Diloloskan atau tidak kami hanya bisa berdoa," tuturnya.

Rappidin pun mengaku tak gentar jika pada akhirnya PDIP memilih jalan berbeda dengan partai politik lainnya. Sebab, PDIP mempunyai 21 kursi di DPRD Sumut. Dengan demikian, partai berlambang banteng tersebut bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain.

BUKA PELUANG KOALISI

Pengurus DPD PDIP mengunjungi Kantor DPW PKS Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Kenanga Raya, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Rabu (10/7). PDIP membuka peluang koalisi dengan PKS untuk mengusung calon kepala daerah di Pilgub Sumut 2024.

SYL Divonis...

meringankan.

Hal memberatkan yaitu SL dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Kemudian, SYL sebagai Menteri Pertanian RI tidak memberikan teladan yang baik.

Lalu, terdakwa SYL tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. SYL dan keluarga serta kolega telah menikmati hasil tindak pidana korupsi.

Sedangkan beberapa hal meringankan yaitu SYL dianggap sudah berusaha lanjut berumur 69 tahun dan belum pernah dihukum. Kemudian, SYL telah memberikan kontribusi positif selaku Menteri Pertanian terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi Covid-19.

Lalu, sepanjang pengamatan majelis hakim, SYL dinilai bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, SYL dan keluarga telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi terdakwa.

Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK yang ingin SYL dihukum dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan ditambah uang pengganti sejumlah Rp44,2 miliar dan 30.000 Dolar Amerika Serikat (AS) subsider empat

Kapolres Didesak...

Rumah Wartawan," mereka menyampaikan beberapa poin tuntutan.

Yakni: Mendukung pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembakaran yang menewaskan wartawan Tribarta TV, Rico Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya.

"Kami juga mendesak pihak kepolisian untuk mengungkap aktor intelektual pembakaran rumah korban. Dalam hal ini, sesuai rilis yang diterima wartawan dari Polda Sumut terkait dugaan keterlibatan Bebas Ginting dalam kasus ini, kami meminta agar Bebas Ginting selaku otak penyusun rencana pembakaran rumah wartawan untuk dilakukan pemeriksaan di Polda Sumut," tulis pengunjukrasa.

Selain itu, mereka juga meminta pihak kepolisian agar membuka rekaman CCTV Panglong Setia Budi, dimulai saat korban tiba di rumahnya usai diantarkan pulang oleh rekannya.

"Atas kasus ini, kami juga akan melayangkan surat ke DPRD Sumut dan DPR RI untuk segera melaksanakan Rapat Dengar Pendapat terkait kasus pembakaran rumah wartawan," sebut massa yang menduga kuat ada oknum-oknum

Israel Kembali...

Israel untuk "melepaskan tuntutan sahnya" dalam negosiasi gencatan senjata di Gaza.

"Namun berlanjutnya pembantaian memaksa kami untuk mematuhi tuntutan kami," kata dia.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mengatakan bahwa perintah evakuasi ini hanya akan menambah penderitaan massal bagi warga Palestina.

"Warga sipil harus dilindungi," kata Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres.

Di wilayah lain di Gaza, serangan memantik Israel telah menghantam empat gedung sekolah yang digunakan sebagai tempat berlindung bagi pengungsi Palestina. Dalam empat hari terakhir, serangan itu menyebabkan

Dalam pilkada, kata Djarot, yang berpengaruh besar adalah figur, bukan koalisi.

Anggota Komisi IV DPR itu menyebut partainya telah menyiapkan sejumlah nama, seperti Nikson Nababan hingga Edy Rahmayadi. Namun, Djarot menyebut keputusan resmi soal itu akan diumumkan langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Untuk itu maka hasil penjurangan ini akan disampaikan di dalam rapat penuh DPP yang langsung dipimpin nanti keputusannya tergantung kepada ibu ketua umum," katanya. (cnni/js)

"Harapan (rencana koalisi), dan semoga harapan itu menjadi kenyataan," kata Ketua DPW PKS Sumut Usman Jakfar usai pertemuan dengan PDIP. Usman menyebutkan kedekatan PKS dan PDIP akan dijadikan modal untuk membangun Sumatera Utara.

"Jadi kunjungan balasan ini dalam rangka untuk mempererat tali silaturahmi PKS dan PDIP. Kedekatan ini akan dijadikan modal untuk membangun Sumut," ujarnya.

Menurut Usman, DPW PKS Sumut sudah menyodorkan empat nama ke DPP PKS untuk diusung di Pilgub Sumut 2024. Empat nama yang disetor ke DPP PKS itu adalah mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Berry Simorangkir, Amir Hamzah, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. "Semuanya kita antarkan ke DPP. Dan nantinya DPP yang memutuskan siapa yang diusung. Semua mendapatkan peluang yang sama. Tapi hingga saat ini belum ada SK yang diberikan kepada siapapun untuk Cagub Sumut," terangnya. (cnni/js)

tahun penjara.

Tindak pidana ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian nonaktif Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementan nonaktif Kasdi Subagyono yang juga menjalani sidang vonis pada hari ini.

MASIH PIKIR-PIKIR

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan sikap pikir-pikir usai divonis 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta dalam kasus pemerasan di lingkungan Kementan.

"Kami dari penasihat hukum, telah berembuk, kesimpulan bahwa untuk saat ini kami pikir-pikir terlebih dahulu," kata salah seorang kuasa hukum SYL saat sidang di PN Tipikor Jakarta, Kamis (11/7).

Dua mantan anak buahnya, yakni Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono yang divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta juga mengambil sikap pikir-pikir. Dalam rapat itu, hakim juga bertanya sikap dari Jaksa Penuntut Umum. "Setelah berdiskusi kami, ambil sikap pikir-pikir dalam rangka pelajari putusan," kata Jaksa. (cnni/js)

yang berupaya untuk menutupi kasus ini guna mengaburkan informasi soal dalang utama atau aktor intelektual dalam peristiwa ini.

"Untuk itu, kami meminta pihak kepolisian untuk bekerja secara profesional dan independen untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Hasil investigasi wartawan, ada dugaan keterlibatan banyak pihak dalam kasus ini. Sehingga kami menilai kasus ini adalah kasus yang berat. Kapolda Sumut dalam konferensi pers di Mapolres Karo sebelumnya menyampaikan untuk sementara kepada kedua tersangka dipersangkakan Pasal 187 ayat 3 dari KUHP. Untuk itu, kami meminta agar seluruh pelaku nantinya dikenakan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana," urai massa.

Aksi demo tersebut berlangsung damai dan Kapolres Karo, AKBP Wahyudi Rahman berjanji akan bekerja maksimal agar kasus tersebut cepat terselesaikan dan meminta kepada masyarakat bila ada bukti lain atau saksi yang ada agar menyampaikan ke polres Karo. (B-019)

sebanyak 49 orang meninggal dunia.

Dua negara di Eropa, Prancis dan Jerman, mengutuk serangan ini.

"Tidak dapat diterima jika sekolah, terutama yang menampung warga sipil yang mengungsi akibat pertempuran, menjadi sasaran," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis.

Israel berdalih serangan-serangan itu menargetkan milisi Hamas yang bersembunyi di gedung-gedung sekolah. Namun Hamas telah membantah tuduhan tersebut.

Hingga kini serangan brutal Israel terus berlanjut, di tengah perundingan gencatan senjata. Jumlah korban sipil yang tewas akibat gempuran Israel juga bertambah hingga lebih dari 38 ribu jiwa. (cnni/js)